

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Konflik persengketaan teritorial di Laut China Selatan (LCS) telah menjadi sebuah pembahasan yang cukup penting dalam konteks keamanan dan pertahanan Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat mendalam terhadap dinamika konflik yang melibatkan berbagai negara dari dalam dan luar kawasan LCS itu sendiri. Kekhawatiran pemerintah Indonesia terjadi karena tingginya eskalasi konflik serta ketidakstabilan kondisi keamanan di kawasan LCS. Eskalasi konflik di LCS menjadikan LCS sebagai sebuah *flash point* yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi konflik terbuka.

Dinamika konflik LCS telah memunculkan persepsi ancaman yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan pertahanan Indonesia pada tahun 2014-2016. Jika dibandingkan dengan kebijakan pertahanan Indonesia pada tahun 2009-2014 yang mengutamakan instrumen diplomasi, kebijakan pertahanan pada 2014-2016 lebih fokus pada pengembangan kekuatan militer di kawasan yang berbatasan langsung dengan LCS. Indonesia menyatakan bahwa konflik LCS dapat

menjadi perang terbuka karena tiga hal. Pertama, kecenderungan pihak-pihak yang terlibat menggunakan kekuatan militer dalam menguatkan klaim di kawasan. Kedua, adanya keterlibatan pihak asing dari luar kawasan. Ketiga, tidak adanya lembaga yang kredibel dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain ketiga hal tersebut, fenomena perlombaan senjata antar negara-negara di kawasan juga menyebabkan eskalasi konflik di LCS. Persepsi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia pada akhirnya mempengaruhi berbagai kebijakan pertahanan Indonesia. Meskipun pada dasarnya Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, namun adanya faktor kedekatan geografis dengan pusat terjadinya konflik menjadi alasan utama munculnya persepsi ancaman Indonesia terhadap konflik yang tengah terjadi. Selain itu, eskalasi konflik yang terus terjadi berkemungkinan untuk terus menjalar dan pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Dinamika konflik LCS telah melahirkan kebijakan-kebijakan dengan tujuan sebagai respon terhadap persepsi ancaman yang dimiliki negara dan juga untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Tujuan utama dari berbagai kebijakan pertahanan Indonesia adalah sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan. Selain itu kebijakan pertahanan juga dilaksanakan untuk menjaga situasi keamanan dan kedaulatan Indonesia serta pertimbangan kepentingan nasional Indonesia. Tingginya intensitas konflik di LCS menjadikan Indonesia sangat mewaspadai kemungkinan gangguan yang dapat timbul dari konflik tersebut. Tindakan pencegahan merupakan aplikasi dari kebijakan pertahanan

Indonesia yang diperlukan untuk menangkal segala kemungkinan gangguan yang akan ditimbulkan oleh konflik LCS.

## 5.2 Saran

Perubahan sikap yang telah diperlihatkan Indonesia dalam menghadapi dan menanggapi konflik yang terjadi di LCS merupakan tindakan yang pantas mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan pertahanan Indonesia di LCS tersebut perlu untuk didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan kedaulatan dan kepentingan nasional negara Indonesia. Karena perubahan orientasi ini dapat menciptakan rasa aman dalam sistem politik Indonesia dan ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Indonesia harus tetap mempertahankan fokus kebijakan pertahanan pada potensi konflik yang besar di LCS. Meskipun begitu, Indonesia tidak boleh mengesampingkan potensi konflik lainnya. Memaksimalkan kebijakan pembangunan postur pertahanan merupakan jawaban dari berbagai problematika yang terjadi. Dengan begitu, keamanan dan kedaulatan negara dapat terus dijaga dan dipertahankan dari segala kemungkinan ancaman yang muncul.

Indonesia juga harus tetap berhati-hati dalam aplikasi kebijakan pertahanan Indonesia ditengah konflik yang tengah terjadi. Hal ini disebabkan karena perubahan orientasi kebijakan pertahanan Indonesia dapat memunculkan mispersepsi dari pihak lain sehingga dapat memicu *security dilemma*. Fenomena ini sangat biasa terjadi dalam konstelasi global yang anarki. Untuk itu, pemerintah harus memastikan perubahan kebijakan pertahanan Indonesia tidak memberikan dampak buruk yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara.